

Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Penerapan Prinsip Transparansi, Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)

Maria Grasiana Yuliana Mau¹, Ati Retna Sari², Mochamad Fariz Irianto³

^{1,2,3} Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Maria Grasiana Yuliana Mau

E-mail: grashymhau@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh konsep pengawasan keuangan, transparansi informasi, dan pemanfaatan sistem akuntansi terhadap fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang dalam pengawasan keuangan daerah. Sebanyak 63 staf Badan Keuangan dan Aset Daerah menggunakan algoritma Slovin dan metode random selection untuk mengisi kuesioner guna mengumpulkan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, disertai uji validitas, reliabilitas, heteroskedastisitas, normalitas, dan multikolinearitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi, pengawasan keuangan, dan keterbukaan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. **Kata kunci** - penggunaan sistem informasi akuntansi, penerapan prinsip transparansi, pengawasan keuangan, pengelolaan keuangan daerah

Abstract

This study aims to examine the influence of the concepts of financial supervision, information transparency, and the use of accounting systems on the function of the Malang Regency Regional Finance and Asset Agency in regional financial supervision. A total of 63 staff members from the Regional Finance and Asset Agency utilized the Slovin algorithm and the random selection method to complete a questionnaire for data collection. We used multiple linear regression as the data analysis technique, along with validity, reliability, heteroscedasticity, normality, and multicollinearity tests. The results of the study indicate that the use of accounting information systems, financial supervision, and transparency are influencing the accountability of regional financial management.

Keywords - use of accounting information systems, implementation of transparency principles, financial supervision, regional financial management

PENDAHULUAN

Apabila seluruh kegiatan pemerintahan dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, maka dapat dikatakan pemerintahan tersebut memiliki tata kelola yang baik. Kemampuan untuk mengakses secara bebas kegiatan pemerintahan daerah, termasuk pendanaan, program, dan pengambilan keputusan, dikenal dengan istilah transparansi. Akuntabilitas merupakan salah satu cara untuk meminta pertanggungjawaban masyarakat atas kejujuran keuangan, transparansi, dan kepatuhan hukum. Dapat dikatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan seperangkat prinsip yang membantu masyarakat umum memahami cara kerja perekonomian bangsa dan merupakan cara untuk mengumpulkan data dari masyarakat umum guna menganalisis sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pemerintah (Sari dkk., 2020).

Nurdiansya (2020) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab hanya dapat terwujud apabila setiap pimpinan instansi memiliki kewenangan penuh terhadap seluruh operasional instansi. Mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, seluruh operasional instansi harus dilaksanakan secara sistematis, teratur, efektif, dan efisien. Sistem akuntansi yang buruk dapat merusak partisipasi publik dan mengorbankan akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas, sebagaimana didefinisikan oleh Elsa Pinika Putri Purba dan Kusmilawaty Kusmilawaty (2024), adalah suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian misi organisasi melalui media akuntabilitas yang dilakukan secara berkala. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang disajikannya, mulai dari penganggaran, penggunaan anggaran, hingga pelaporan secara umum. Menetapkan sasaran kinerja yang akan dicapai oleh organisasi yang diberi mandat merupakan langkah awal dalam menetapkan tanggung jawab tersebut. Penetapan sasaran akuntabilitas akan mempertimbangkan kinerja yang akan dicapai organisasi dari waktu ke waktu.

Capaian ini patut diapresiasi, masih ada sejumlah masalah yang perlu dicermati, terutama terkait pengelolaan sumber daya daerah yang masih belum jelas. Minimnya informasi aset menghambat DPRD untuk melakukan pengawasan secara efisien. Selain itu, pengelolaan aset dinilai kurang serius. Hal ini ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang, Sanusi yang mengakui bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sulit dilakukan karena belum adanya inventarisasi aset yang signifikan dan minimnya upaya sertifikasi tanah.

Penulis ingin meneliti pengaruh pengawasan keuangan, penerapan asas keterbukaan informasi, dan pemanfaatan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan meninggalkan latar belakang informasi yang telah diuraikan sebelumnya dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian dari penelitian sebelumnya. Judul ini dipilih karena menggambarkan permasalahan aktual dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Kabupaten Malang, seperti belum tersedianya data yang dapat diandalkan dan belum adanya transparansi mengenai aset daerah. Untuk meningkatkan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, hal ini merupakan permasalahan krusial yang perlu mendapat perhatian lebih.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi Akuntansi

Informasi yang berharga bagi bisnis, perencanaan, dan manajemen, sistem informasi akuntansi menangani data dan transaksi (Widiastuti et al., 2023). Sistem ini membantu para pengambil keputusan dengan mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan membuat laporan. Lebih jauh lagi, sistem informasi akuntansi mengawasi dan memandu manajemen keuangan daerah, mulai dari pelaporan hingga perencanaan (Hipertensiva, 2020). Sistem informasi akuntansi keuangan kini dibutuhkan untuk menghasilkan informasi bagi pihak eksternal sesuai dengan persyaratan yang relevan (Vladinov, 2021).

Transparansi

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Salah satu definisi transparansi adalah bersikap transparan saat membuat keputusan dan saat memberikan informasi penting dan relevan tentang bisnis atau organisasi. Konsep transparansi memastikan bahwa setiap orang memiliki fleksibilitas atau kemampuan untuk mengetahui tentang bagaimana pemerintah diimplementasikan, yaitu mengenai kebijakan, bagaimana kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan, dan hasil yang telah dicapai.

Pengawasan Keuangan

Untuk menghindari atau memperbaiki kesalahan dan penyimpangan, pengawasan keuangan merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan pemantauan, pemahaman, dan pengajaran setiap tindakan individu. Dengan mengikuti strategi yang ditentukan, prosedur ini berupaya untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan beroperasi secara efektif dan efisien. Pengawasan pada dasarnya berkaitan dengan pencegahan penyimpangan dari tujuan yang harus dipenuhi guna menyediakan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab dan transparan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Putri (2020) mengemukakan bahwa akuntabilitas meliputi proses penyelenggaraan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Hasil-hasilnya, baik yang berhasil maupun yang tidak, diketahui oleh masyarakat dan DPRD sehingga dapat dinilai pada tahun berikutnya.

HIPOTESIS

1. Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Penerapan Prinsip Transparansi, Pengawasan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.

Semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan sistem ini, maka pengelolaan keuangan daerah akan semakin transparan. Selain itu, pengawasan keuangan daerah dan tugas pemerintah untuk mengawasi keuangan daerah saling terkait dan erat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dibuat hipotesis awal.

H1 : Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Penerapan Prinsip Transparansi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.

2. Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Menurut Yohana (2021), sistem informasi akuntansi mengumpulkan informasi tentang aktivitas perusahaan, mengubahnya menjadi data yang bermakna, dan menyediakannya bagi pengguna internal dan eksternal. Kosanke (2019) menyoroti bahwa perencanaan dan administrasi ekonomi daerah memerlukan sistem akuntansi yang mengendalikan transaksi keuangan. Anggota staf yang memahami sistem akuntansi dan manajemen keuangan regional harus membuat laporan keuangan sehingga pengguna dapat mengakses informasi keuangan yang relevan. Hipotesis kedua dapat diungkapkan sebagai berikut berdasarkan uraian di atas:

H2 : Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Pengaruh Penerapan Prinsip Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Gagasan "tata kelola pemerintahan yang baik" menjaga demokrasi dengan menjamin bahwa pemerintah berfungsi secara terbuka dan bertanggung jawab. Sistem akuntansi, kompetensi, dan keterbukaan semuanya berdampak pada tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, menurut penelitian Herlina dkk. (2018). Pengaruh isu-isu ini dapat dikurangi dengan langkah-langkah pengendalian internal, tetapi kompetensi belum ditangani dengan baik (Dewi Yuli Angrain (2019).

Komunikasi yang terbuka adalah dasar dari transparansi. Semua informasi, lembaga, dan prosedur pemerintah harus terbuka bagi orang yang berkepentingan, dan informasi tersebut harus komprehensif dan dapat dilacak. Berikut ini adalah pernyataan hipotesis ketiga yang dapat dibuat dengan menggunakan format yang dijelaskan sebelumnya:

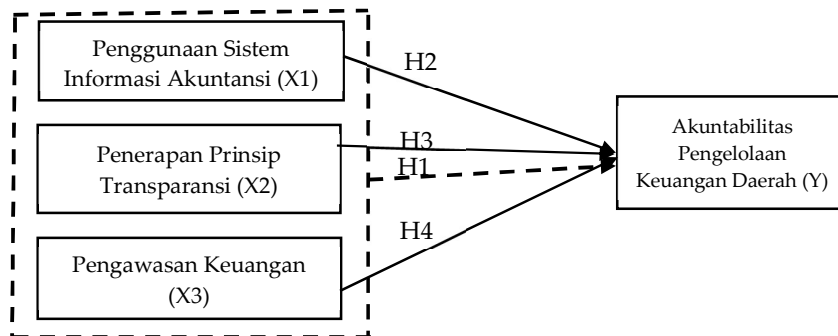
H3 : Pengaruh Penerapan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Nadialista Kurniawan (2021) Kabupaten Temanggung dapat meningkatkan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan menggunakan pengawasan keuangan, sistem informasi, dan penganggaran berbasis kinerja. Menurut penelitian Vladimir tahun 2021, terdapat korelasi yang kuat antara pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan pengawasan keuangan daerah. Menurut Kosanke (2019), peningkatan pengawasan keuangan dapat meningkatkan tanggung jawab pemerintah dan menyoroti betapa pentingnya menjamin pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan, aturan, dan regulasi. Berikut ini adalah kesimpulan dari hipotesis keempat berdasarkan uraian sebelumnya:

H4 : Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.

Kerangka Konseptual



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

Keterangan :

—————→ : Pengaruh Parsial
-----→ : Pengaruh Simultan

METODE

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian. Proses perolehan pengetahuan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melibatkan analisis informasi tentang topik yang diinginkan dengan memanfaatkan data dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, sebanyak 171 orang pegawai dari bagian aset, akuntansi, pelaporan, anggaran, perbendaharaan, dan kesekretariatan di BKAD Kabupaten Malang diminta untuk menilai sentimen mereka terhadap variabel-variabel tersebut dengan menggunakan skala likert. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan jumlah responden akhir, yaitu sebanyak 63 orang. Metode yang digunakan adalah Random Sampling. Indikator dan variabel yang berkaitan dengan Pengawasan Keuangan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Penerapan Prinsip Transparansi dimasukkan ke dalam kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data primer

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1 .

Uji Normalitas (*Kolmogorof Smirnov Test*) One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual

N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,10074176
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,079
	Negative	-,047
Test Statistic		,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,081c

Nilai signifikan sebesar $0,081 > 0,05$ yang diperoleh dari temuan uji normalitas Kolmogorov Smirnov yang ditunjukkan pada tabel terlampir menunjukkan bahwa data yang digunakan terdistribusi normal.

Uji Multikolineritas

Tabel 2.

Uji Multikolineritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (X_1)	0,370	2,701	Tidak Terjadi Multikolineritas
Penerapan Prinsip Transparansi (X_2)	0,738	1,355	Tidak Terjadi Multikolineritas
Pengawasan Keuangan (X_3)	0,434	2,304	Tidak Terjadi Multikolineritas

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas yaitu Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (X_1), Penerapan Prinsip Transparansi (X_2), dan Pengawasan Keuangan (X_3) memiliki nilai toleransi $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,0$ maka tidak terdapat indikasi multikolineritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 3 .

Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (X_1)	0,644	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Penerapan Prinsip Transparansi (X_2)	0,105	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Pengawasan Keuangan (X_3)	0,418	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Data diolah, 2024

Tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas karena setiap variabel independen pada tabel sebelumnya memiliki nilai signifikan lebih tinggi dari 0,05.

2. Regresi Linear Berganda

Tabel 4.

Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients (Beta)	Ket.
	(B)	Std. Error		
Konstanta	12,489	2,211		
Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (X ₁)	0,142	0,036	0,264	Positif
Penerapan prinsip transparansi (X ₂)	1,221	0,067	0,874	Positif
Pengawasan keuangan (X ₃)	-0,128	0,039	-0,204	Negatif

Jelas dari tabel sebelumnya bahwa model persamaan regresi berganda terlihat seperti ini.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 12,489 + 0,142X_1 + 1,221X_2 - 0,128X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta 12,489 menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas (X₁, X₂, X₃) bernilai 0, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) akan bernilai 12,489.
- Koefisien regresi penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (X₁) sebesar 0,142 berarti setiap kenaikan 1 unit pada X₁ akan meningkatkan Y sebesar 0,142, menunjukkan pengaruh positif.
- Koefisien penerapan prinsip transparansi (X₂) sebesar 1,221 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada X₂ akan meningkatkan Y sebesar 1,221, yang juga menunjukkan pengaruh positif.
- Koefisien pengawasan keuangan (X₃) sebesar -0,128 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada X₃ akan menurunkan Y sebesar 0,128, menunjukkan pengaruh negatif.

3. Analisis Koefisien Regresi (R²)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R²)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
0,949	0,900	0,895	1,00911

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,895 yang berarti sistem informasi akuntansi, transparansi, dan pengawasan keuangan daerah memiliki tanggung jawab sebesar 89,5% terhadap pengelolaan keuangan daerah, sedangkan sisanya sebesar 10,5% hanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji f

Tabel 6 Uji F (Simultan)

Variabel	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig F
Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (X ₁)	176,915	2,761	0,000
Penerapan Prinsip Transparansi (X ₂)			
Pengawasan Keuangan (X ₃)			

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H1 valid karena variabel Pengawasan Keuangan (X₃), Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (X₁), dan Penerapan Prinsip Transparansi (X₂) memiliki nilai F hitung sebesar 176,915 lebih besar dari F tabel sebesar 2,761 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05).

Uji t

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig t
Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (X1)	3,907	2,000	0,000
Penerapan Prinsip Transparansi (X2)	18,240	2,000	0,000
Pengawasan Keuangan (X3)	3,271	2,000	0,002

Karena Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X1) dengan nilai hitung sebesar 3,907 lebih besar dari t tabel sebesar 2,000 yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Malang, maka H2 diterima pada taraf signifikansi 0,007 ($p < 0,05$). H4 juga diterima pada taraf signifikansi 0,036 ($p < 0,05$). Selanjutnya H5 dinyatakan benar karena Sistem Pengendalian Intern (X4) memiliki nilai hitung sebesar 4,185 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,005 dan memiliki taraf signifikansi 0,000 ($p < 0,05$).

B. Pembahasan Penelitian

Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Penerapan Prinsip Transparansi dan Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA), penerapan asas keterbukaan, dan pengawasan keuangan terpadu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Malang. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama menumbuhkan budaya tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Pengawasan keuangan menjamin kepatuhan terhadap peraturan, transparansi informasi menjamin aksesibilitas, dan SIA menawarkan landasan teknologi. Akuntabilitas paling dipengaruhi secara signifikan oleh transparansi kebijakan, menurut analisis regresi linier berganda. Dengan menyediakan akses data keuangan yang relevan bagi semua pihak yang berkepentingan, transparansi pengelolaan keuangan menumbuhkan akuntabilitas publik.

Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah BKAD Kabupaten Malang. Akuntabilitas akan meningkat jika penggunaannya baik dan akan menurun jika penggunaannya buruk. Kesimpulan ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (Angrain, 2019; Asfiryati, 2019; Rosmalita & Nadirsyah, 2020; Yuliana, 2020; Vladimir, 2021; Putra & Priono, 2022).

Pengaruh Penerapan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Malang sangat dipengaruhi oleh penerapan konsep transparansi. Berdasarkan analisis regresi berganda, variabel kebijakan transparansi memiliki pengaruh yang positif. Dalam menangani kewajiban keuangan daerah, BKAD akan lebih proaktif apabila prinsip transparansi digunakan dengan tepat. Sebaliknya, keterbukaan akan lebih berhasil apabila organisasi memiliki tanggung jawab yang lebih besar.

Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah di BKAD Kabupaten Malang sangat dipengaruhi oleh faktor pengawasan keuangan. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan koefisien regresi negatif, yang menunjukkan korelasi negatif antara pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan. Pejabat daerah dapat melakukan suap ketika membayar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan pengawasan keuangan.

KESIMPULAN

Analisis penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa akuntabilitas informasi pengelolaan keuangan daerah pada BKAD Kabupaten Malang dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan sistem akuntansi, penerapan prinsip transparansi, dan pengawasan keuangan secara simultan. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang menggunakan ketiga faktor tersebut untuk menunjukkan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi dan memengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan keuangan dapat menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan norma yang relevan, informasi dapat diakses melalui pesan terbuka, dan Sistem Informasi Akuntansi menawarkan basis teknis yang solid.

Saran dari penelitian ini Kebijakan dan regulasi, transparansi informasi, penggunaan teknologi informasi, budaya organisasi, keterlibatan masyarakat, pendidikan dan pelatihan, keadaan ekonomi dan sosial, dan konteks politik merupakan elemen tambahan yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah oleh badan usaha. Elemen-elemen tersebut dapat berdampak pada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah oleh badan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Yuli Angrain. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JOM Fekon*, 3, 1178–1189.
- Elsa Pinika Putri Purba, & Kusmilawaty Kusmilawaty. (2024). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. *Akuntansi*, 3(1), 304–319. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v3i1.1490>
- Kosanke, R. M. (2019). Pengaruh kualitas sistem informasi dan pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan instansi. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01, 1–7.
- Nurdiansya. (2020). Pengaruh Pengawasan Fungsional Dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman. 1–23.
- Putri. (2020). (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau) Oleh : Firstcilia Eldy Putri Pembimbing : Yuneita Anisma dan Al Azhar A. 32.
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697>
- Vladimir. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Medan. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Yohana, M. jeni lumban gaol. (2021). Sistem Informasi Akuntansi. *Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi*, 3.